



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA**

Program : Program Pola Hubungan Jaringan Persandian  
Kegiatan : Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah  
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2020

---

---

**A. LATAR BELAKANG**

Sebagai negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi yang tepat dalam mewujudkan *good governance* ini adalah efektivitas pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Hal yang penting juga dilakukan adalah komunikasi dalam pemerintahan itu sendiri dan antar lembaga pemerintahan.

Supaya penyampaian gagasan oleh pemerintah terhadap masyarakat atau sebaliknya tetap berlanjut, komunikasi adalah satu-satunya jembatan penghubung nomor satu yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Apabila baik komunikasi pemerintah terhadap masyarakat, maka tujuan komunikasi pemerintahan dalam menyampaikan gagasan atau program pemerintah akan sukses.

Keberhasilan organisasi pemerintahan baik daerah maupun pusat lebih banyak ditentukan oleh keunggulan pemimpinnya. Keunggulan pemimpin ditentukan oleh keunggulannya dalam berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi dan lingkungan tempat dia berada. Karena itu komunikasi pemerintahan merupakan komponen pokok bagi para pemimpin organisasi pemerintahan. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah akan berhasil, jika pemerintah mampu mengkomunikasikannya kepada rakyatnya.

Komunikasi adalah pertukaran gagasan atau argumen pada penerima atau responden yang akan mempengaruhi pola pikir atau tindakan responden setelah menerima pesan tersebut. Oleh karena itu sistem komunikasi dalam organisasi pemerintahan baik itu antar birokrasi maupun masyarakat harus positif.

Dalam sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) aktualisasi informasi sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kerancuan informasi dalam komunikasi akan sangat rentan menimbulkan komunikasi yang menyebabkan timbulnya konflik dalam tatanan pemerintahan dan dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri.

Pada era *e-government* ini, keterbukaan informasi publik seperti yang disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2008 dan yang diatur dalam UU GIPA adalah untuk menyederhanakan akses informasi, mendorong diskusi terbuka yang berkontribusi terhadap debat publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menginformasikan kepada masyarakat tentang operasional lembaga, memastikan pengawasan yang efektif terhadap pengeluaran dana publik, mengungkapkan atau membuktikan kesalahan atau kelalaian, sesuatu yang tidak benar atau melanggar hukum, karena informasi beredar secara langsung dan terbuka, pengawasan, dan pengelolaan anggaran. dan begitu banyak informasi yang terjadi dengan terang benderang, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan besar untuk suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat.

Tertutupnya komunikasi dalam pemerintahan akan menimbulkan kecurigaan dan kesenjangan yang kadang dengan sengaja dikarenakan demi kepentingan pribadi organisasi politik, komunikasi sebagai landasan ujung tombak untuk mendapatkan kekuasaan dengan sistem manajemen konflik.

Penataan pola komunikasi pemerintahan perlu diperhatikan dan difokuskan pada tugas lembaga-lembaga komunikasi-informasi itu sendiri. Jangan sampai tugas pokok dan fungsi lembaga informasi tersebut tidak lagi mengikuti tupoksi yang seragam, malah lari dan mengacu pada tugas yang dibebankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga menyebabkan putusnya jalur kerja sama, koordinasi dan jaringan kerja teknis operasional. Sehingga setiap kegiatan pemerintah akan membawa akibat bertambahnya biaya pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran informasi, serta pemberdayaan lembaga-lembaga komunikasi sampai kepada masyarakat.

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu

komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), instruksi, atau perasaan-perasaan (*feelings*) (Malone, 1997: 170) berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya.

Bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi (Beach, 1975: 580). Pemahaman tentang peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam organisasi pemerintah, seperti apakah pesan diterima dan dilaksanakan dengan benar, memungkinkan organisasi pemerintah mencapai tujuannya sesuai dengan harapan. Oleh karena itu komunikasi pemerintahan merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan baik untuk *managing staff* dan *managing people*.

Komunikasi pemerintahan untuk *managing staff* merupakan komunikasi internal organisasi dan bertujuan agar pegawai atau staf mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan dan agar eksekutif pemerintah mendapatkan informasi dari pegawai tentang hasil pelaksanaan pekerjaan yang semuanya bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan efisien. Komunikasi pemerintahan untuk *managing people* merupakan komunikasi eksternal organisasi untuk memberikan informasi tentang berbagai kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi-organisasi non pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, sekaligus mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan

dan juga informasi tentang dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau dimodifikasi.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.900/001/Kpts/KOMINFO-PS/2020 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Kegiatan Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah Tahun 2020 ini untuk terselenggaranya pelayanan E-Government dengan pengamanan data informasi di Kabupaten, sedangkan tujuan dari kegiatan ini ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis Jarigan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis Jaringan komunikasi sandi internal perangkat daerah;

- 3) Mengidentifikasi dan menganalisis Jaringan komunikasi sandi pimpinan daerah;

**D. SASARAN**

Kegiatan Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah Tahun 2020 ini ingin mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Teridentifikasinya pola hubungan komunikasi sandi di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Menganalisis pola hubungan komunikasi sandi;
- c. Tersedianya dokumen pedoman pola hubungan komunikasi sandi di Kabupaten Pesisir Selatan;

**E. LOKASI**

Kegiatan Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah Tahun 2020 ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

**F. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah Tahun 2020 ini mencakup kegiatan Menetapkan Kebijakan Persandian dan Keamanan Informasi, Menganalisis dan Riset Persandian dan Keamanan Informasi, dan Melakukan Manajemen Persandian dan Keamanan Informasi. Pelaksanaan kegiatan ini melingkupi pekerjaan sebagai berikut :

1. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi;
  - a) pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat
  - b) struktural internal pemerintah daerah;
  - c) alur informasi yang dikomunikasikan antar
  - d) perangkat daerah dan internal perangkat daerah;
  - e) teknologi informasi dan komunikasi;
  - f) infrastruktur komunikasi; dan
  - g) kompetensi personel.
2. Analisis pola hubungan komunikasi sandi;
  - a) pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
  - b) topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;

- c) perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
  - d) tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
3. Tersedianya dokumen pedoman pola hubungan komunikasi sandi di Kabupaten Pesisir Selatan;

#### **G. ORGANISASI**

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk struktur organisasi penanggungjawab dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penanggung jawab Program/PA : JUNAIDI, S.Kom., M.E
- Penanggung jawab Kegiatan/KPA : SYAFRUDIN, SH, M.Si
- Pelaksana Kegiatan/PPTK : NANANG SYUFRIADI, ST
- Bendaharawan Pengeluaran : BELLANY TRIANA

#### **H. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik tahun 2020 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2020, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

#### **I. KELUARAN DAN HASIL**

Keluaran Kegiatan Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah Tahun 2020 adalah:

- 1) Teridentifikasinya pola hubungan komunikasi sandi di Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Menganalisis pola hubungan komunikasi sandi;
- 3) Tersedianya dokumen pedoman pola hubungan komunikasi sandi di Kabupaten Pesisir Selatan;

**J. BIAYA**

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik Tahun 2020 dianggarkan dana sebesar Rp.43.960.000,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 DPA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Diketahui oleh :  
Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pesisir Selatan,



**JUNAIDI, S.Kom, ME**

NIP. 19700609 199703 1 002

Dibuat oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
e-Government dan Persandian

**SYAFRUDIN, SH, M.Si**

NIP. 19781001 200003 1 002

**TABEL  
JADWAL KEGIATAN PENGELOLAAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		Minggu Ke																																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan administrasi kegiatan	■	■	■	■																																												
2	Rapat tim penyusun pola hubungan komunikasi pemerintah					■	■	■																																									
3	Pengumpulan data pola hubungan komunikasi pemerintah ke Kecamatan									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
4	Koordinasi dan konsultasi mengenai pola hubungan pemerintah ke Provinsi																																																
5	Pengolahan dan penyusunan pola hubungan komunikasi pemerintah																									■	■	■	■	■	■	■	■																
6	Verifikasi dan klarifikasi data dengan OPD terkait																																																
7	Perbaikan draft profil daerah																																																
8	Final laporan pola hubungan komunikasi pemerintah																																																
9	Cetak laporan pola hubungan komunikasi pemerintah																																																
10	Penyelesaian administrasi																																																

**Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun  
Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah 2020**

**JADWAL KERJA HARIAN KEGIATAN PENGELOLAAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH TAHUN 2020**

KEGIATAN	JANUARI																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSIAPAN	■			■	■						■	■						■	■						■	■					
Penyusunan Administrasi Kegiatan				■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■														
Penyiapan Usulan PPTK														■	■	■	■														
Penyusunan KAK PO																	■				■	■	■	■	■	■					
Penyiapan Persiapan Uang Persediaan																											■	■	■	■	
Penyiapan ATK Kegiatan																													■	■	
Koordinasi dan konsultasi mengenai Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah ke Provinsi	■			■	■							■	■																		■

KEGIATAN	FEBRUARI																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
PELAKSANAAN	■	■						■	■						■	■						■	■							■
Penyiapan administrasi rapat tim kecil		■	■	■	■			■	■						■	■							■	■						
Penyiapan bahan-bahan rapat dan bahan pola hubungan komunikasi	■	■				■	■	■	■	■	■				■	■							■	■						
Rapat tim kecil penyusunan pola hubungan komunikasi pemerintah	■	■						■	■				■	■			■	■					■	■						
Pengumpulan data-data sekunder pola hubungan komunikasi pemerintah	■	■						■	■						■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

KEGIATAN	MARET																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
pengumpulan data-data ke lapangan untuk bahan penyusunan pola hubungan komunikasi pemerintah	■	■	■				■	■						■	■							■	■			■			■	■	
Pengumpulan data dan peninjauan lapangan ke Kecamatan Koto XI Tarusan	■			■			■	■						■	■							■	■			■			■	■	
Melakukan crosscheck data	■				■	■	■	■						■	■							■	■			■			■	■	



**Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2020**  
**Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah**

KEGIATAN	MEI																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Pengumpulan data dan peninjauan lapangan ke Kecamatan Airpura	Y	Y	Y	B	B	B	Y		Y	Y					Y	Y					Y		Y	Y	Y					Y	Y	
Melakukan crosscheck data							Y	B								Y	Y															
Pengumpulan data dan peninjauan lapangan ke Kecamatan Pancung Soal	Y	Y	Y				Y				B	B	B			Y	Y					Y		Y	Y	Y					Y	Y
Melakukan crosscheck data														B	B																	
Pengumpulan data dan peninjauan lapangan ke Kecamatan Ranah IV Hulu	Y	Y	Y				Y									Y	Y		B	B	B										Y	Y
Melakukan crosscheck data																						B					B	B	B	B		
Koordinasi dan konsultasi mengenai Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah ke Provinsi	Y	Y	Y				Y									Y	Y					Y		Y	Y	Y	B	B	B	B	Y	Y

KEGIATAN	JUNI																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Pengumpulan data dan peninjauan lapangan ke Kecamatan BAB Tapan	B	B	B			Y	Y						Y	Y							Y	Y					Y	Y					
Melakukan crosscheck data				B	B	Y	Y						Y	Y							Y	Y						Y	Y				
Pengumpulan data dan peninjauan lapangan ke Kecamatan Lunang						Y	Y	B	B	B			Y	Y							Y	Y						Y	Y				
Melakukan crosscheck data											B	B									Y	Y						Y	Y				
Pengumpulan data dan peninjauan lapangan ke Kecamatan Silaut						Y	Y								B	B	B				Y	Y						Y	Y				
Melakukan crosscheck data																			B	B								Y	Y				
Pengolahan data dan penyusunan pola hubungan komunikasi pemerintah						Y	Y														Y	Y	B	B	B			Y	Y				
Melakukan crosscheck data																					Y	Y				B	B		Y	Y			

**Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2020**  
**Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah**

KEGIATAN	JULI																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Pengolahan data dan penyusunan pola hubungan komunikasi pemerintah	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koordinasi dan konsultasi mengenai Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah ke Provinsi				■	■						■	■						■	■						■	■					■	■

KEGIATAN	AGUSTUS																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pengolahan data penyusunan pola hubungan komunikasi pemerintah	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■			■		■	■						■	■	
penyiapan surat undangan untuk verifikasi data dengan OPD terkait	■	■						■	■	■					■	■	■			■		■	■						■	■	
Rapat tim penyusun untuk verifikasi data dengan OPD terkait	■	■						■	■			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	
Perbaikan draft pola hubungan komunikasi pemerintah	■	■						■	■						■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

KEGIATAN	SEPTEMBER																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Final laporan pola hubungan komunikasi pemerintah	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koordinasi dan konsultasi mengenai Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah ke Provinsi					■	■						■	■							■	■					■	■				■

KEGIATAN	OKTOBER																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Final laporan pola hubungan komunikasi pemerintah	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun  
Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah 2020**

KEGIATAN	NOVEMBER																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Cetak laporan																															
Penyelesaian administrasi keuangan																															
Koordinasi dan konsultasi mengenai Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah ke Provinsi																															

KEGIATAN	DESEMBER																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Penyelesaian administrasi keuangan																																
Koordinasi dan konsultasi mengenai Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah ke Provinsi																																